

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR

Yulidhin Khoirul Aswanah¹, Anthon Efani², Agus Tjahjono²

ABSTRAK

Program minapolitan yaitu Konsep pembangunan ekonomi local berbasis manajemen wilayah dengan motor penggerak sector kelutan dan perikanan, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelutan Perikanan no. 39 Tentang Penetapan Kawasan Mianapolitan, maka salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan adalah Pelabuhan Perikanan Brondong Kabupaten Lamongan dengan basis perikanan tangkap. Tujuna utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kecocokan antara perencanaan dan implementasi dari program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode analisa dta secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan sample yang digunakan yaitu purposive dan incidental sampling. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuisioner. Dari hasil penelitian, dalam tahap implementasinya, pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini belum sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Baik mengenai proses jalannya program maupun waktu pelaksanaanya, yang disebabkan oleh factor yaitu keterbatasan dana, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* dan kurangnya partisipasi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya mencari sumber perdanaan lain yang sah. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat.

Kata Kunci: Minapolitan, Stakeholder, Perikanan Tangkap

¹Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan Universitas Brawijaya Malang

²Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Keluatan Universitas Barwajaya

EVALUATION IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL MINAPOLITAN PROGRAM DEVELOPMENT IN BRONDONG FISHING PORT AT LAMONGAN EAST JAVA

Yulidhin Khoirul Aswanah¹, Anthon Efani², Agus Tjahjono²

ABSTRACT

Fishery minapolitan program is the concept of local economic development based on management region with prime mover on marine and fisheries sector to support the growth of the national economic. Based on the Ministry of Marine Fisheries Decree 39 About Determination of Minapolitan Region, so the is one of the minapolitan site Fishery Harbour Brondong at Lamongan. The main objective of this study is to evaluate suitabilities between planning and implementation fishery minapolitan program at Lamongan. The Type of this research was descriptive, while the data analysis were qualitatively and quantitatively. Tha sampling technique was used purposive and incidental sampling. The methods of data collection by interviews, observations, documentations, and questionnaires. Based on the results, implementation of fishery minapolitan programs not suitable with the objective and plans setting. Both process and time conduct of the program implementation, it is caused by multiple factors that are; funds limited, lack of coordination and cooperation among stakeholders, and the lack of fisherman communities participation. Therefore, government should find another sources legitimate funding. It is needed more coordination among stakeholders and public.

Keywords: minapolitan, stakeholder, fishing port

¹Student Department of Social Economics Fisheries, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, UB Malang.

²Lecturer Department of Social Economic Fisheries, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, UB Malang.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumberdaya sector perikanan berpotensi dijadikan penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional, akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut belum dikelola secara optimal. Sejalan dengan perubahan yang begitu cepat disegala bidang maka kebijakan pembangunan perikanan memerlukan perubahan atau penyesuaian.

Kebijakan terobosan yang dicanangkan oleh KKP adalah melalui Revolusi Biru (perubahan cara berpikir dari daratan ke maritim) yang diimplementasikan melalui konsep minapolitan. Minapolitan yaitu konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sector kalautan dan perikanan, dengan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi.

Ada tiga basis dalam program minapolitan yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan sentra garam. Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan no.39 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap dan budidaya.

Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi pada minapolitan berbasis perikanan tangkap, dengan karakteristik perikanan tangkap yang bersifat *common property* dan *open acces*, sector ini dinilai rawan penyimpangan terhadap implementasi program minapolitan. Masalah lainnya adalah terbatasnya modal dan teknologi penangkapan ikan, rendahnya kualitas SDM nelayan, lemahnya pengawasan, dan data statistik perikanan tangkap yang kurang akurat, sehingga kenyataannya dibutuhkan persiapan dan pembenahan yang menyeluruh sebelum tahap implementasi program. Oleh karena itu implementasi dari program ini perlu dievaluasi untuk mencegah kegagalan program, dan hasil evaluasi diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang menunjang keberlanjutan program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan.

Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi:

1. Profil minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan
2. Tingkat kesiapan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program minapolitan perikanan tangkap
3. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan perikanan tangkap di kabupaten Lamongan
4. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terhadap pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong
5. Tingkat partisipasi masyarakat nelayan terhadap program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di kawasan PPN Brondong
6. Factor pendukung dan factor penghambat dalam program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong

Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pemerintah
Sebagian bahan evaluasi dan pertimbangan untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan program minapolitan khususnya minapolitan berbasis perikanan tangkap
2. Masyarakat nelayan
Sebagai sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah sehingga dapat memahami, menerima dan menyikapi program tersebut
3. Perguruan tinggi
Dapat dijadikan sebagai masukan dan kepustakaan kebijakan tentang program minapolitan berbasis perikanan tangkap
4. Peneliti
Sebagai wacana dalam memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat menambah wawasan dalam berpikir praktis

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian akan menyajikan data yang berupa kata-kata, table, gambar atau foto yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah kawasan PPN Brondong yang terletak di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2012

Fokus Penelitian

Focus dalam penelitian ini adalah evaluasi terhadap implementasi program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan yang meliputi; profil, tingkat kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, komitmen Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat, serta factor pendukung dan penghambat program

Metode Pengambilan Sample

Pada penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan *incidental sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Teknik ini digunakan untuk menggali data kepada narasumber atau responden dengan pertimbangan yaitu orang yang paham atau mengetahui informasi terkait program pengembangan kawasan minapolitan, seperti pihak DKP, Bappeda, Dinas Pelabuhan, pelaku usaha dan tokoh nelayan. Jumlah narasumber ini tidak dibatasi hingga data yang diperoleh sudah jenuh, atau tidak ada penambahan informasi lagi.

Metode *incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan (Sugiyono, 2011). Teknik ini digunakan untuk menggali data pada nelayan terkait dengan partisipasi mereka terhadap program minapolitan. Jumlah sampel pada metode *incidental* ini dibatasi dengan menggunakan perhitungan dari rumus *Linear Time Function (LTF)*, yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan estimasi kendala waktu (Sari dalam Septiayuningtyas, 2009). Hal ini karena populasi nelayan tidak tetap dan

nelayan anggota populasi sering tidak ditempat. Besarnya jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{T - t_0}{t_1}$$

t_1

Keterangan :

n = Banyaknya sampel yang terpilih

T = Waktu yang tersedia untuk penelitian (14 hari x 24 jam = 336 jam)

t_0 = Waktu tetap (12 jam/hari x 14 hari = 168 jam)

t_1 = Waktu yang digunakan untuk sampling unit (0,25 jam x 14 hari = 3,5 jam)

Berikut perhitungan jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{T - t_0}{t_1}$$

t_1

$$n = \frac{336 - 168}{3,5}$$

3,5

$$n = \frac{168}{3.5}$$

3.5

Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Marzuki (2002), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Data primer yang ingin dikumpulkan antara lain; kondisi lokasi penelitian, proses pelaksanaan program, komitmen pemda, system koordinasi antara pemerintah daerah, propinsi dan pusat, tingkat partisipasi nelayan, serta factor pendukung dan penghambat program

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data sekunder yang ingin dikumpulkan antara lain: rencana induk, rencana pengusaha, rencana tindak, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD), letak geografi, topografi, demografi dan peta wilayah Kabupaten Lamongan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab. Dalam penelitian ini, wawancara dilakuakn untuk menggali data terkait perencanaan dan pelaksanaan minapolitan, wawancara dilakuakn dengan narasumber dari pihak DKP, Dinas Pelabuhan, Bappeda dan tokoh nelayan.

2. Observasi

Observasi ialah pengamatan langsung dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengamati kondisi lokasi penelitian dan pelaksanaan kegiatan program.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Akbar, 2009). Dokumentasi digunakan untntuk mencari data berupa RTRW, RPIJMD, dan peta geografi dan topografi Kabupaten Lamongan.

4. Kuesioner

Kuesioner ialah daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirim kepada responden, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan

kepada nelayan untuk mengetahui tingkat partisipasinya dalam program minapolitan.

Analisis Data

Pada penelitian ini analisa data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dengan cara deskripsi berupa uraian kata-kata atau interpretasi dari gambar atau table. Analisa kualitatif digunakan untuk mengetahui profil, perencanaan, implementasi, komitmen Pemda, serta factor pendukung dan penghambat program minapolitan. Sedangkan metode analisa data secara kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan pelaksanaan program minapolitan, dan mengukur tingkat partisipasi nelayan dalam program minapolitan tersebut.

Tahap-tahap analisa data yang dilakukan disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian :

- Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui profil minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan disajikan dengan cara deskriptif meliputi kawasan, komoditas unggulan, dan tim pelaksana program.
- Tujuan yang kedua yaitu menganalisis tingkat kesiapan pelaksanaan program minapolitan, maka dianalisis profil minapolitan berdasarkan kondisi enam pilar pembangunan minapolitan (infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, kebijakan dan governance), yang kemudian analisis ini digunakan sebagai acuan untuk memberikan skor atau nilai sehingga dapat diukur indeks kesiapannya, dengan kriteria sebagai berikut :
 - 0 – 50 Tidak siap melakukan program minapolitan
 - ≥ 50 – 55 Siap melaksanakan program minapolitan dengan pembenahan infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, serta kebijakan
 - ≥ 55 – 85 Siap melaksanakan program minapolitan dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan
 - ≥ 85 – 100 Siap melaksanakan program minapolitan secara mandiri
- Tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi konsistensi antara perencanaan dan implementasi program minapolitan, meliputi kesesuaian antara perencanaan dengan tujuan, pelaksanaan dengan perencanaan, tingkat kemajuan pelaksanaan dengan rencana, hasil pelaksanaan dan tujuan, waktu dan perencanaan.
- Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui komitmen Pemda dalam program minapolitan maka disajikan data secara deskriptif terkait peran Pemda dalam memfasilitasi program tersebut. Yaitu dilihat dari kesesuaian kawasan minapolitan dengan RTRW, adanya program minapolitan dalam RPIJM, adanya SK Bupati terkait penetapan kawasan, tersedianya rencana induk, rencana pengusahaan dan rencana tindak, adanya tim pelaksana program, dan kemauan Pemda dalam berkoordinasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat.
- Tujuan yang kelima yaitu untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, data yang diperoleh dari hasil menyebar kuesioner kemudian diberi penilaian atau skor dengan skala Guttman seperti yang disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Skala pengukuran model Guttman

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya (1)	Tidak (0)
1	Pertanyaan 1	1	0
2	Pertanyaan 2	1	0
3	Pertanyaan 3	1	0
4	Pertanyaan 4	1	0
5	Pertanyaan 5	1	0

Skor yang diperoleh kemudian di persentase dengan rumus seperti dibawah ini.

$$\% \text{ partisipasi} : \frac{\text{Total jawabanya}}{(\text{responden} \times \text{pertanyaan})} \times 100\%$$

- Tujuan yang keenam yaitu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program maka hasil penggalan semua data baik secara wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada $6^{\circ} 51' 54''$ sampai dengan $7^{\circ} 23' 6''$ Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur $122^{\circ} 4' 4''$ sampai $122^{\circ} 33' 12''$. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah $\pm 1.812,8 \text{ km}^2$. Dengan panjang garis pantai 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas $902,4 \text{ km}^2$, apabiladihitng 12 mil dari permukaan laut.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas sebagai berikut : sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Wilayah Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 474 desa/ kelurahan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten pada tahun 2011 sebanyak 1.305.898 jiwa.

Gambaran Umum Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong merupakan bagian wilayah Kabupaten Lamongan yang terletak di belahan utara. Wilayah Kecamatan Brondong yang meliputi areal seluas 7.013,62 Ha, $\pm 50 \text{ km}$ dari ibu kota Kabupaten Lamongan. Kecamatan Brondong terdiri atas 9 desa 1 kelurahan. Kecamatan ini berada pada koordinat antara $06^{\circ} 53' 30,81''$ – $7^{\circ} 23' 6''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 17' 01,22''$ – $112^{\circ} 33' 12''$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kecamatan Paciran, sebelah selatan Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro, sebelah barat Kecamatan Palang Tuban. Dilihat dari keadaan geografisnya, maka Kecamatan Brondong dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu daerah pantai dan daerah pertanian. Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Brondong sampai akhir bulan april 2012 sebanyak 57.344 jiwa.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Bedasarkan SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987 tanggal 14 Juli 1987, secara resmi pelabuhan perikanan Brondong ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis(UPT) Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) sampai saat ini.

Lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong terletak di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan posisi koordinat secara geografis pada $06^{\circ} 53' 30,81''$ LS dan $112^{\circ} 17' 01,22''$ BT. Sebagai basis utama perikanan laut di wilayah utara Jawa Timur karena daerah tangkapnya (fishing ground) adalah laut utara jawa yang menjangkau perairan laut lepas pantai yang sangat potensial. Jumlah pegawai PPN Brondong sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 75 orang. PPN Brondong banyak bekerjasama dengan instansi yang mempunyai sektor terkait yaitu dengan Pengawas Sumberdaya Ikan, Perum PPS Cabang Brondong, DKP, KUD Mina Tani, Puskesmas, Bank Swamitra Mina, Unit Usaha Kecil, Jamsostek, TPI Labuhan Tengah, TPI Labuhan Barat, TPI Labuhan Timur, TPI Weru, TPI Kranji dan TPI Brondong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Minapolitan Perikanan Tangkap di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor 188/152/Kep/413.013/2011, tanggal 14 juni 2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan, maka minapolitan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lamongan terletak di Kecamatan Brondong sebagai sentra kawasan minapolitan (minapolis) dengan Pusat Pengelolaan Minapolitan (PPM) di PPN Brondong, dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan pendukung atau *hinterland*.

Secara umum minapolitan berbasis perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan di kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan stok di laut. Komoditas unggulan yang telah ditetapkan yaitu ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran. Serta telah terbentuk tim POKJA (Kelompok Kerja) untuk mengelolah program minapolitan yang terdiri dari penanggung jawab adalah Bupati lamongan, ketua pelaksana adalah Sekretaris Daerah, sekretaris pelaksana adalah Kepala DKP, bidang perencanaan adalah Kepala Bappeda, bidang pemberdayaan yaitu kepala pelabuhan, dan anggotanya adalah instansi – instansi lain yang terkait.

Tingkat Kesiapan Pelaksanaan Program Minapolitan

Tingkat kesiapan pelaksanaan minapolitan dapat diukur berdasarkan hasil perhitungan indeks yang mengacu pada enam pilar minapolitan (infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, kebijakan dan governance), maka diperoleh indeks kesiapan pelaksanaan program minapolitan sebesar 78,25. Ini berarti Kabupaten Lamongan dengan PPM di PPN Brondong dalam kategori siap melaksanakan program minapolitan namun dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan.

Evaluasi Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi Program Minapolitan

Perencanaan program minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Lamongan disusun dengan sasaran program yaitu: 1) Perbaikan sumberdaya ikan, 2) Perbaikan desain palkah kapal penangkapan ikan, 3) Pembangunan ekonomi kerakyatan, 4)

Pembangunan infrastruktur, 5) Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan. Secara keseluruhan perencanaan program ini dituangkan dalam rencana aksi berupa matrik pogram kegiatan yang tersusun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Matrik program kegiatan ini terdiri dari tiga kelompok kegiatan yaitu pembangunan infrastruktur, kegiatan perikanan dan kegiatan non perikanan.

Implementasi program minapolitan merupakan realisasi dari matrik program yang telah tersusun. Dari 63 kegiatan yang direncanakan dalam program minapolitan perikanan tangkap tahun 2012, sampai saat ini hanya enam kegiatan yang terlaksana yaitu pembangunan *breakwater*, *pavingstone* jalan pesisir, pembangunan jalan komplek, pengadaan rumpon, pembinaan KUB dan pengadaan timbangan ikan. Serta dilaksanakan sembilan kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang, yaitu rehabilitasi *breakwater*, pembangunan kantor POKMASWAS, pengadaan instalasi listrik, pengadaan alat tangkap bubu, pengadaan alat tangkap payang teri, peningkatan K3 di TPI, *review masterpln*, pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 1), pengadaan peralatan pendukung PPDI (paket 2).

Dalam tahap implementasinya, pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini belum sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Baik mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan program maupun waktu pelaksanaannya, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Keterbatasan dana, tidak ada sumber pendanaan lain kecuali dari APBN
2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama baik antar *stakeholder* maupun antara *stakeholder* dan masyarakat.
3. Kurangnya antusiasme implementator dalam pelaksanaan program akibat dari perubahan struktur birokrasi baik di tataran pusat maupun pelaksana program itu sendiri
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait arah kebijakan minapolitan

Komitmen Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, maka komitmen pemerintah daerah meliputi kontribusi pembiayaan, personil, fasilitas pengelolaan dan pengembangan kawasan. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan terhadap pelaksanaan program minapolitan cukup tinggi terbukti dengan terpenuhinya persyaratan administratif berupa tersedianya SK bupati terkait kawasan dan POKJA, kesesuaian pembentukan kawasan minapolitan dengan RTRW daerah, program minapolitan masuk ke dalam RPIJMD, terbentuk masterplan program pengembangan minapolitan, adanya kontribusi APBD untuk program minapolitan dan kesadaran Pemda untuk berkoordinasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat dalam bentuk rapat koordinasi.

Partisipasi Masyarakat Nelayan

Responden yang diambil sebagai sampel untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini adalah masyarakat pelaku usaha penangkapan atau nelayan, baik itu pemilik kapal, nahkoda maupun ABK dengan alat tangkap yang berbeda-beda. Nelayan yang diambil adalah nelayan yang berada di kawasan PPN Brondong. Karakteristik responden adalah memiliki sebaran umur rata-rata 50 tahun dengan pengalaman kerja rata-rata 30 tahun. Rata-rata pendidikan nelayan hanya setingkat SD.

Dalam penelitian ini, partisipasi nelayan dibedakan menjadi dua, yaitu 1) partisipasi nelayan dalam memahami dan mengikuti program minapolitan, 2) partisipasi nelayan dalam mendukung keberhasilan program pengembangan kawasan minapolitan. Diperoleh skor untuk partisipasi dan pemahaman masyarakat terkait dengan program minapolitan sangat minim yaitu sebanyak 8,92 %. Selain disebabkan karena faktor kualitas SDM nelayan yang rendah, hal ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi program dari pemerintah itu sendiri kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat nelayan program pengembangan kawasan minapolitan di PPN Brondong, yaitu meliputi partisipasi dalam pemanfaatan fasilitas (sarana dan prasarana) sebesar 23,8 %, partisipasi dalam kegiatan organisasi sebesar 40,83 %, partisipasi dalam mematuhi tata tertib sebesar 65,8 %, dan tingkat kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi sebesar 63 %. Faktor utama penyebab minimnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya kesadaran nelayan terhadap manfaat dari fasilitas yang disediakan maupun manfaat dari organisasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil semua data yang terhimpun, maka dapat dijabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Kabupaten Lamongan. Faktor-faktor pendukungnya yaitu: pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau pelabuhan tipe B, sehingga fasilitas yang dimiliki cukup memadai untuk menunjang kegiatan perikanan; letak geografis Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai kota penyangga Kota Propinsi (Surabaya); permintaan ikan segar maupun olahan oleh pasar masih sangat tinggi, sehingga berapapun produksinya akan diserap oleh pasar; sebagian besar nelayan telah melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, hal ini akan menunjang keberlanjutan stok sumberdaya perikanan.

Sedangkan faktor - faktor penghambatnya yaitu: rendahnya kualitas SDM nelayan; sumberdaya perikanan di Laut Jawa mengalami over fishing, dan belum ada organisasi basis masyarakat terkait pengkayaan stok dan konservasi sumberdaya perikanan; adanya keterbatasan dana dalam pembiayaan program; terjadinya pembelian di atas kapal sebelum mendarat, sehingga pelelangan menjadi kurang berfungsi. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Profil minapolitan perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu kawasan minapolitan terletak di Kecamatan Brondong sebagai minapolis, dengan PPM di PPN Brondong, dan Kecamatan Paciran sebagai kawasan hinterland. Komoditas unggulannya yaitu ikan tongkol, kembung, layang dan kuniran. Tim POKJA minapolitan dibentuk berdasarkan SK Bupati yang sudah ditetapkan. Tujuan minapolitan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan stok di laut

2. Diperoleh indeks kesiapan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap sebesar 78,25 yang berarti Kabupaten Lamongan dalam kategori siap melaksanakan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap namun dengan memperkuat kelembagaan dan kebijakan.
3. Dalam tahap implementasinya, pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ini belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Baik mengenai proses jalannya program maupun waktu pelaksanaannya.
4. Komitmen pemerintah daerah cukup tinggi terbukti dengan terpenuhinya persyaratan administrasi berupa SK kawasan dan SK POKJA, kesesuaian dengan RTRW daerah, masuk ke dalam RPIJMD, terbentuk masterplan program, kontribusi APBD dan berkoordinasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat dalam bentuk rapat koordinasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kawasan minapolitan masih rendah. Faktor utama penyebab minimnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.
6. Faktor – faktor pendukung program diantaranya adalah pelabuhan Brondong beroperasi dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau pelabuhan tipe B, letak Kabupaten Lamongan yang strategis sebagai daerah penyangga kota propinsi (Surabaya), permintaan pasar untuk ikan segar maupun olahan masih sangat tinggi, sebagian besar masyarakat nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
7. Sedangkan faktor – faktor penghambatnya yaitu kualitas SDM nelayan masih rendah, sumberdaya perikanan Laut Jawa mengalami over fishing, adanya keterbatasan dana; pelelangan di TPI kurang berfungsi; kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka beberapa saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah daerah hendaknya menyeimbangkan pertumbuhan keenam pilar pembangunan minapolitan (infrastruktur, masyarakat dan bisnis, 10 sumberdaya dan tata ruang, kelembagaan, teknologi, kebijakan dan governance) dengan lebih memperkuat pilar kelembagaan dan kebijakan. Akselerasi pertumbuhan dari pilar kelembagaan dan kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemberian kebijakan-kebijakan yang pro nelayan.
2. Pemerintah daerah hendaknya mencari sumber pendanaan lain yang sah, misalnya dari BUMD sebagai alternatif untuk menambah kekurangan dana.
3. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik antar stakeholder maupun antara stakeholder dan masyarakat. Peningkatan koordinasi antar stakeholder dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan rapat koordinasi sedangkan peningkatan koordinasi antara stakeholder dan masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran penyuluh saat sosialisasi maupun pelaksanaan kegiatan program.
4. Perlu adanya pembentukan Marine Protected Area (MPA) basis masyarakat melalui optimalisasi peran POKMASWAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 18/Men/2011 tentang **Pedoman Umum Minapolitan**.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.39/Men/2011 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perikanan Dan Kelautan Nomor Kep.32/Men/2010 tentang **Penetapan Kawasan Minapolitan**.
- Marzuki, 2002. **Metodologi Riset**, Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan 2011. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
- Septiayuningtyas, 2009. **Arahan Pengembangan Paket Wisata Kabupaten Sumenep**. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sugiyono, 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**. Alfabeta. Bandung.
- Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setyadi, 2009. **Metode Penelitian Sosial**. Bumi Aksara. Jakarta